AKURASI Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan
p-ISSN : 2685-1059
e-ISSN : 2685-1059
Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram

PERANAN MEDIASI BELANJA PEMERINTAH DAN MODERASI AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Yuniarto Hadiwibowo[1], Akhmad Priharjanto[2], Fadlil Usman[3], Ernest Rakinaung[4]
Politeknik Keuangan Negara STAN[123] , Kementerian Dalam Negeri[4]
[1]Corresponding author: yhadiwibowo@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Dikirim tanggal:1/11/ 2023
Revisi pertama tanggal:24/11/ 2023
Diterima tanggal: 14/12/2023
Tersedia online tanggal: 28/12/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi belanja pemerintah, moderasi akuntabilitas keuangan, pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah berperan sebagai mediasi terhadap hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 dengan perekonomian daerah dan akuntabilitas keuangan berperan sebagai moderasi dari hubungan antara belanja pemerintah dengan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pendapatan asli daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah untuk menunjang perekonomian daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, perekonomian daerah, belanja pemerintah, Covid-19

ABSTRACT

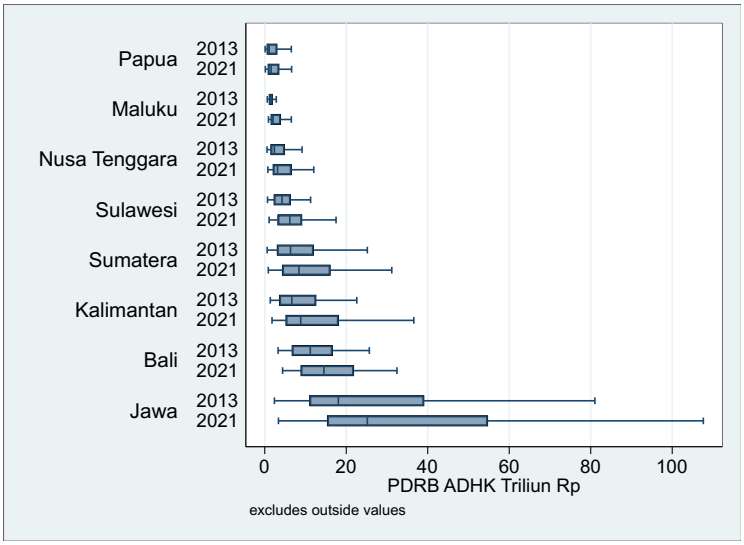
This research aims to evaluate the effects of mediation of government spending, moderation of financial accountability, local original income, regional wealth, quality of human resources, and the COVID-19 pandemic in the regional economy. This research uses panel data analysis for the population of all municipalities in Indonesia from 2013 to 2021. This research provides evidence that government spending is mediating the effects of local original income, regional wealth, quality of human resources, and the COVID-19 pandemic on the regional economy, and financial accountability plays a moderating role in the relationship between government spending and the regional economy. This research also proves that local own-source revenue, regional wealth, quality of human resources, and the COVID-19 pandemic influence the regional economy. The implication of this research is the importance of management of the local own-source revenue and financial accountability of local government to support the regional economy.

Keywords: Accountability, regional economy, government expenditure, Covid-19

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia. Dalam klasifikasi World Bank, saat ini Indonesia tergolong *Upper Middle Income country*. Segenap usaha diperlukan untuk menjadi negara maju. Dengan wilayah berbentuk kepulauan dari Sabang hingga Merauke berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, berbagai daerah Indonesia memiliki beragam karakteristik dan kondisi. Wilayah Indonesia terdiri dari 98 Kota dan 416 Kabupaten. Usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan perekonomian di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berita Resmi Statistik dari BPS pada berbagai periode menunjukkan bahwa sebaran Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tidak merata. Perekonomian pada daerah tertentu lebih tinggi daripada daerah lain. Kabupaten/kota di Jawa memiliki PDRB yang lebih tinggi daripada wilayah lain, terutama di bagian timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah yang relatif tertinggal akan mengurangi ketimpangan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan instabilitas. Daerah yang tertinggal perlu didorong untuk dapat tumbuh lebih cepat. Gambar 1 membandingkan kondisi perekonomian pada tahun 2013 dan 2021. Kabupaten/kota dikelompokkan dalam posisi atau wilayahnya. Terlihat bahwa kabupaten/kota di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara lebih rendah daripada daerah lain di Indonesia. Sementara itu, wilayah Jawa dan Bali memiliki perekonomian yang terbesar.



Gambar 1. Perekonomian Daerah 2013 dan 2021

Peningkatan perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan *pro growth*. Kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian. Salah satu teori tentang pertumbuhan ekonomi ini adalah *growth theory* dari Solow. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besarnya modal dan tenaga kerja (Mankiw, 2016). Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama adalah besarnya sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan dari suatu perekonomian. Di lingkungan pemerintah daerah, sumber daya fisik dapat berupa

aset pemerintah daerah. Sumber daya manusia terdiri dari aparat pemerintah daerah, maupun masyarakat di daerah tersebut pada umumnya. Sumber daya keuangan berasal dari pendapatan daerah yang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya (Dharma, 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akuntabilitas dibedakan menjadi dua, opini Wajar Tanpa Pengecualian atau opini modifikasian. Daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian mempunyai kinerja lebih. Akan tetapi, Saragih & Hasibuan (2020) dan Verawaty et al. (2021) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas menurut Saragih & Hasibuan (2020) dibagi menjadi lima jenis opini audit. Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas terhadap perekonomian dengan mengklasifikasikan akuntabilitas keuangan menjadi empat jenis opini audit, yaitu Tidak Memberikan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian, dan Wajar Tanpa Pengecualian.

Peran pemerintah berdasarkan hasil penelitian terdahulu memberikan hasil yang bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa pemerintah berperan positif (Junejo et al., 2021; Dibia & Onwuchekwa, 2019), ada yang menemukan efek negatif dari pendapatan atau belanja pemerintah (Nguyen & Darsono, 2022). Ada pula yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung pada berbagai kondisi (Nyasha & Odhiambo, 2019) dan sifat belanja (Sasongko & Wibowo, 2022). Penelitian ini mengisi celah konsep dengan menggunakan belanja daerah sebagai variabel mediasi dan akuntabilitas keuangan sebagai varabel moderasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran belanja daerah, akuntabilitas keuangan, pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Penelitian yang menghubungkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perekonomian daerah masih belum banyak dijumpai (Dharma, 2022). Kontribusi penelitian ini adalah menghubungkan antara belanja daerah dan akuntabilitas keuangan dengan kinerja perekonomian daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. *Novelty* dari penelitian ini adalah penggunaan variabel belanja daerah untuk mediasi dan akuntabilitas keuangan untuk moderasi hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah pusat dan daerah memainkan peran yang penting dalam peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan pendapatan atau belanja, peningkatan akuntabilitas keuangan, pembangunan sumber daya manusia, manajemen aset daerah, dan pencegahan krisis.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *grand theory* desentralisasi pembangunan dari Faguet & Poschl (2015). Desentralisasi mempengaruhi pembangunan dengan meningkatkan tata pemerintahan (*governance*), kompetisi yang menguntungkan antar daerah, menghindari keberpihakan hanya pada sekelompok orang, dan memperkuat daerah. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 514 kabupaten/kota. Kegiatan perekonomian yang terjadi di kabupaten/kota akan terakumulasi menjadi perekonomian nasional. Peningkatan perekonomian Indonesia bergantung pada perkembangan ekonomi di daerah. Sejak

desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2000, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Peningkatan perekonomian nasional tidak lepas dari perkembangan perekonomian daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengemban amanat yang besar untuk mengelola daerah masing-masing, terutama sejak masa otonomi daerah yang diperluas sejak awal tahun 2000an. Setiap program atau kegiatan membutuhkan biaya yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban ini menjadi belanja daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lain. Dengan demikian belanja daerah merupakan cermin dari pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah, maka semakin besar pula aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Semakin besar aktivitas pemerintah daerah, maka semakin besar dorongan terhadap perekonomian daerah. Peningkatan belanja pemerintah akan mendorong perekonomian untuk lebih maju (Ahuja & Pandit, 2020; Putri et al., 2018; Runtunuwu & Karim, 2023; Sabilla & Sumarsono, 2022; Yuliadi, 2020).

H_1: Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Kekayaan daerah merupakan modal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan. Kekayaan ini berupa seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mendorong perekonomian. Riset terdahulu menyatakan aset pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (Song et al., 2020; Du et al., 2022; Ambarwati & Payamta, 2015; Zuhroh, 2018). Manajemen aset yang optimal merupakan kunci sukses dari suatu pemerintah (Detter & Fölster, 2016).

H_2: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber manusia yang tinggi, program dan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi, akan tercipta produksi barang dan jasa yang lebih besar (Suprapto et al., 2022). Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mendorong perekonomian (Zhang & Danish, 2019; Winarto et al., 2022; Murtala & Sapitri, 2023; Srivastava & Talwar, 2020; Budihardjo et al., 2020; Lumbantoruan & Hidayat, 2015).

H_3: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

Pandemi Covid-19 terjadi di awal tahun 2020 berdampak pada perekonomian. Mobilitas orang menjadi terbatas dan perdagangan melambat. Perekonomian dunia terganggu karena adanya krisis, yang juga menyebabkan perlambatan perekonomian daerah. Perlambatan ini terjadi pada jangka pendek dan jangka panjang (Ridha & Parwanto, 2020). Covid-19 memperlambat perekonomian dan perdagangan internasional serta menyebabkan pengangguran (Khan et al., 2021; Soava et al., 2021). Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis (Huda et al., 2022; Mursalina et al., 2022). Covid-19 juga memperlambat program pemberantasan kemiskinan (Vitenu-Sackey & Barfi, 2021) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Insani et al., 2023).

H_4: Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah.

Korkmaz et al. (2022) menyatakan pajak efektif untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan *internal growth model*. Akan tetapi, dampak pajak terhadap perekonomian masih belum menjadi konsensus dalam literatur. Studi terdahulu menyatakan pajak berdampak positif (Junejo et al., 2021; Dibia & Onwuchekwa, 2019; Wardani & Huda, 2023), ada pula yang menyatakan pajak berdampak negatif (Nguyen & Darsono, 2022). Pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung belanja daerah. Semakin tinggi aktivitas pemerintah daerah, maka semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan. Semakin tinggi belanja daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan daerah yang harus disiapkan. Sebaliknya, semakin besar pendapatan daerah yang dikumpulkan, maka belanja daerah dapat dialokasikan semakin besar. Semakin besar belanja yang dikeluarkan, maka semakin tinggi dorongan terhadap perekonomian. Pendapatan daerah mempengaruhi perkonomian melalui peningkatan belanja daerah (Arvin et al., 2021; Gurdal et al., 2021).

H_5: Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah.

H_6: Belanja pemerintah berperan memediasi hubungan antara kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, pandemi Covid-19, dan pendapatan daerah dengan perekonomian daerah.

Akuntabilitas keuangan merujuk pada keterbukaan, kewajaran, dan akurasi dalam melaporkan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi. Akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jika pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang efisien dan akurat, mereka akan dapat melacak dengan baik penerimaan pajak dari berbagai sumber, ini dapat membantu memastikan bahwa semua potensi penerimaan pajak telah diperhitungkan dan dikumpulkan secara tepat, meningkatkan pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Opini audit dapat mengurangi tingkat korupsi (Panji & Utomo, 2023). Dengan akuntabilitas yang tinggi, korupsi akan dapat ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat (Erum & Hussain, 2019; Peprah et al., 2023). Dengan akuntabilitas keuangan yang baik, belanja pemerintah akan menjadi efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian daerah. Institusi pemerintah akan bertambah kuat. Dengan institusi yang kuat, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Arif & Chishti, 2022; Epo & Nochi Faha, 2020).

H_7: Akuntabilitas keuangan mempengaruhi hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Wilayah yang berbentuk kota berjumlah 98 daerah dan yang berbentuk kabupaten berjumlah 416 daerah. Penelitian ini menyertakan 508 kabupaten/kota dengan tidak menyertakan 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta karena otonomi di DKI Jakarta yang berada di level Provinsi. Periode analisis meliputi tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.

Variabel perekonomian daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan per kapita dari Kabupaten/Kota. Angka per kapita digunakan untuk memasukkan jumlah penduduk dalam perhitungan. Data PDRB ADHK per kapita diperoleh dari Statistik Indonesia (BPS). Variabel belanja daerah diukur dengan total belanja daerah. Data total belanja daerah diperoleh dari realisasi anggaran dari

Kementerian Keuangan. Belanja daerah ini dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah penduduk sehingga menjadi belanja daerah riil per kapita.

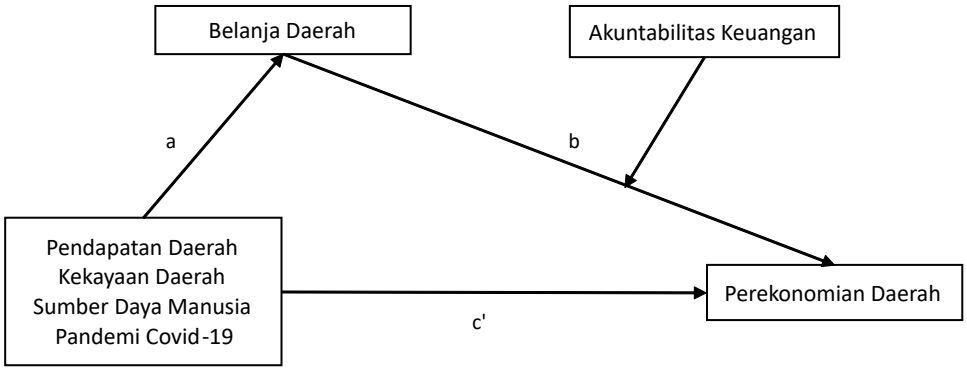
Variabel pendapatan daerah diukur dengan Pendapatan Asli Daerah. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Pendapatan daerah ini dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah penduduk sehingga menjadi pendapatan daerah riil per kapita. Variabel kekayaan daerah diukur dengan jumlah aset daerah. Aset daerah adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di awal tahun. Data aset daerah diperoleh dari neraca daerah dari Kementerian Keuangan. Kekayaan daerah ini dibagi dengan deflator dan dibagi jumlah penduduk sehingga menjadi kekayaan daerah riil per kapita. Nilai dari variabel perekonomian daerah, belanja daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah sangat bervariatif. Untuk menghindari dampak dari ukuran yang berbeda ini, variabel perekonomian daerah, belanja daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah dinyatakan dalam bentuk logaritma natural.

Variabel sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Statistik Indoesia (BPS). Nilai IPM disajikan dalam bentuk persentase. Variabel akuntabilitas keuangan diukur dengan opini audit atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai yang diberikan adalah 1 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat, 2 untuk opini Tidak Wajar, 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 4 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian. Variabel Covid-19 menandai periode terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Variabel ini dibuat dengan *dummy variable* dengan nilai 0 untuk tahun 2013 sampai dengan 2019 dan 1 untuk tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi/Rujukan
Dependen:			
Perekonomian daerah	Produk Domestik Regional Bruto	log perkapita	Saragih & Hasibuan (2020)
Independen:			
- Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	log perkapita	Korkmaz et al. (2022); Junejo et al. (2021)
- Kekayaan Daerah	Aset Daerah	log perkapita	Song et al. (2020)
- Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Suprapto et al. (2022); Zhang & Danish (2019)
- Pandemi Covid-19	Dummy Variabel	2020-2021 = 1, 2013-2019 = 0	Mursalina et al. (2022)
Mediasi:			
Belanja Daerah	Total Belanja Daerah	log perkapita	Ahuja & Pandit (2020)
Moderasi:			
Akuntabilitas Keuangan	Opini atas LKPD	TMP=1; TW=2; WDP=3; WTP=4	Saragih & Hasibuan (2020); Dharma (2022)

Kerangka konseptual penelitian disajikan dalam Gambar 2. Belanja daerah merupakan mediasi dari hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Akuntabilitas keuangan merupakan moderasi dari variabel belanja daerah dan perekonomian daerah.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = i1 + c_1 pad_{it} + c_2 ast_{it} + c_3 ipm_{it} + c_4 cov_{it} + e1_{it} \quad (1)$$

$$blj_{it} = i2 + a_1 pad_{it} + a_2 ast_{it} + a_3 ipm_{it} + a_4 cov_{it} + e2_{it} \quad (2)$$

$$y_{it} = i3 + c'_1 pad_{it} + c'_2 ast_{it} + c'_3 ipm_{it} + c'_4 cov_{it} + b_1 blj_{it} + b_2 acc_{it} + b_3(acc_{it} \cdot blj_{it}) + e3_{it} \quad (3)$$

Keterangan:

y_{it} = Perekonomian daerah
blj_{it} = Belanja daerah
pad_{it} = Pendapatan daerah
ast_{it} = Kekayaan daerah
ipm_{it} = Sumber daya manusia
cov_{it} = Pandemi Covid-19
acc_{it} = Akuntabilitas keuangan
e_{it} = error

Persamaan 1 menunjukkan efek total dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Persamaan 1 ini tidak menyertakan belanja daerah dan akuntabilitas keuangan. Koefisien c_1, c_2, c_3, dan c_4 merupakan efek total dari keempat variabel tersebut. Persamaan 2 menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap belanja daerah. Persamaan ini menguji apakah belanja daerah berperan sebagai mediasi dalam hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Koefisien a_1, a_2, a_3, dan a_4 mengukur besarnya hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap belanja daerah.

Persamaan 3 menguji secara keseluruhan hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid dengan memasukkan mediasi

belanja daerah. Persamaan ini juga menyertakan akuntabilitas keuangan yang memoderasi hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Koefisien c'_1, c'_2, c'_3, dan c'_4 merupakan efek langsung dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid terhadap perekonomian daerah. Efek tidak langsung dari keempat variabel tersebut dihitung dengan mengalikan koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi persamaan 2 dengan koefisien belanja pada persamaan 3 (b_1). Perhitungannya adalah $a_1 \times b_1$, $a_2 \times b_1$, $a_3 \times b_1$, dan $a_4 \times b_1$. Efek langsung dari belanja daerah ditunjukkan oleh koefisien b_1. Koefisien b_3 menunjukkan efek moderasi dari akuntabilitas keuangan terhadap efek langsung belanja daerah terhadap perekonomian daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2. Data berasal dari 514 kabupaten/kota. Periode penelitian adalah tahun 2013 sampai dengan 2021. Dari 514 kabupaten/kota, hanya 508 yang memiliki data keuangan daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lima kota dan satu kabupaten berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang otonominya berada di level Provinsi sehingga tidak tersedia data tersebut pada level kabupaten/kota.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel		Mean	Std. Dev	Min	Max	Observasi	
perekonomian daerah	overall	10,18	0,69	8,19	13,12	N=	4.623
	between		0,68	8,30	12,94	n=	514
	within		0,13	8,97	11,30	T-bar=	8,99
belanja daerah	overall	8,02	0,67	6,25	10,98	N=	4.552
	between		0,65	6,73	10,59	n=	508
	within		0,16	6,84	9,14	T-bar=	8,96
pendapatan daerah	overall	5,49	0,68	2,41	8,35	N=	4.552
	between		0,61	3,43	8,11	n=	508
	within		0,32	3,14	8,29	T-bar=	8,96
kekayaan daerah	overall	8,68	0,82	4,35	13,29	N=	4.506
	between		0,77	7,02	11,54	n=	508
	within		0,27	4,97	10,43	T-bar=	8,87
sumber daya manusia	overall	68,15	6,85	24,42	87,18	N=	4.623
	between		6,70	28,25	85,48	n=	514
	within		1,41	64,22	72,74	T-bar=	8,99
akuntabilitas	overall	3,61	0,70	1	4	N=	4.552
	between		0,48	1	4	n=	508
	within		0,50	1,05	5,83	T-bar=	8,96

Regresi panel dilakukan untuk semua persamaan (Persamaan 1, 2, dan 3). Ketiga persamaan tersebut masing-masing diregresikan sebanyak 3 kali, masing-masing dengan metode Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (untuk menghemat tempat, hasil tidak disertakan). Ringkasan hasil pemilihan model disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pemilihan Model

Model	Pengujian	Indikator	Model Terpilih
Model 1	Chow test	F test = 207,84 dengan p-value <0,0000	FEM
	Hausman test	χ^2 sebesar 71,97 dengan p-value < 0,0000	FEM
Model 2	Chow test	F test = 40,12 dengan p-value <0,0000	FEM
	Hausman test	χ^2 sebesar 1.369,43 dengan p-value < 0,0000	FEM
Model 3	Chow test	F test = 278,88 dengan p-value <0,0000	FEM
	Hausman test	χ^2 sebesar 108,93 dengan p-value < 0,0000	FEM

Pada persamaan 1, Chow test menghasilkan nilai F sebesar 207,84 dengan p-value di bawah 0,0000. Hausman test menghasilkan nilai χ^2 sebesar 71.97 dengan p-value di bawah 0,0000. Dengan demikian model terpilih pada Persamaan 1 adalah Fixed Effect Model. Pemilihan model pada Persamaan 2 menunjukkan hasil Chow test nilai F sebesar 40,12 dengan p-value di bawah 0,0000. Hausman test menghasilkan nilai χ^2 sebesar 1.369,43 dengan p-value di bawah 0,0000. Dengan demikian model terpilih pada Persamaan 2 adalah Fixed Effect Model. Chow test pada hasil regresi Persamaan 3 menunjukkan nilai F sebesar 278,88 dengan p-value di bawah 0,0000. Hausman test menunjukkan nilai χ^2 sebesar 108,93 dengan p-value di bawah 0,0000. Dengan demikian Fixed Effect Model adalah model terbaik untuk persamaan 3.

Uji asumsi klasik untuk regresi meliputi uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskesdasitas. Uji autokorelasi tidak diperlukan mengingat data bersifat panel dan uji normalitas juga tidak diperlukan mengingat data berjumlah besar sehingga memenuhi *Central Limit Theorem* (Gujarati & Porter, 2009). Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel bebas tidak ada yang memiliki korelasi lebih dari 0,90 dan nilai VIF seluruh variabel (tanpa melibatkan interaksi) tidak lebih daripada 10. Uji heteroskedastisitas menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas, tetapi analisis dengan menggunakan *Generalized Estimating Equations* (GEE) menunjukkan hasil yang tetap konsisten. GEE dapat digunakan untuk data dengan asumsi yang lebih sedikit sehingga dapat menganalisis data yang tidak normal, memiliki autokorelasi, dan heteroskedastik (Pekár & Brabec, 2018; Huang, 2022; Ballinger, 2004).

Tabel 3 menampilkan hasil estimasi dari ketiga model yang terpilih. Terdapat 3 hasil estimasi: regresi mediasi moderasi terhadap perekonomian daerah (kolom 2), regresi terhadap belanja daerah (kolom 3), dan regresi efek total terhadap perekonomian daerah (kolom 4). Hasil regresi perekonomian daerah pada kolom 2 menunjukkan F hitung sebesar 844,65. F hitung pada kolom 3 pada regresi belanja daerah bernilai 595,67. Pada kolom 4, nilai F hitung sebesar 861,74. Dengan demikian ketiga model tersebut memenuhi syarat untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki hubungan positif dengan perekonomian daerah dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Kenaikan belanja daerah sebesar 1% akan meningkatkan perekonomian daerah sebesar 0,3373%. Peningkatan belanja daerah berarti peningkatan program atau kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Program/kegiatan pembangunan mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian H1 terbukti. Hal ini sejalan dengan temuan Ahuja and Pandit (2020).

Tabel 3. Hasil Estimasi

	Perekonomian Daerah		Belanja Daerah		Perekonomian Daerah	
belanja daerah	0,3373	***				
	(0,0156)					
pendapatan daerah	0,0528	***	0,2563	***	0,1480	***
	(0,0055)		*(0,0072)*		*(0,0055)*	
kekayaan daerah	0,0339	***	0,0935	***	0,0705	***
	(0,0050)		*(0,0074)*		*(0,0056)*	
sumber daya manusia	0,0373	***	0,0115	***	0,0408	***
	(0,0014)		*(0,0020)*		*(0,0015)*	
pandemi covid-19	0,0264	***	-0,1184	***	-0,0190	***
	(0,0042)		*(0,0060)*		*(0,0046)*	
akuntabilitas	-0,1121	***				
	(0,0295)					
akuntabilitas * belanja daerah	0,0131	***				
	(0,0036)					
Intercept	4,3528	***	5,0455	***	5,9595	***
	(0,1439)		*(0,1348)*		*(0,1030)*	
Jumlah observasi	4506		4506		4506	
R-squared	0,60		0,37		0,46	
Adjusted R-squared	0,55		0,29		0,39	
F statistic	844,65		595,67		861,74	
Log likelihood	4.925,76		3.070,53		4.279,95	
Akaike Information Criterion	-9.835,52		-6.131,07		-8.549,90	
Bayesian Information Criterion	-9.784,22		-6.099,00		-8.517,83	

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05

Selanjutnya, kolom kedua pada Tabel 4 menunjukkan efek dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap belanja daerah. Seluruh koefisien tersebut signifikan pada level <0,001. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 kolom 3, pada regresi belanja daerah. Bersamaan dengan belanja daerah yang berpengaruh positif, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 mempunyai efek tidak langsung terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian H6 terbukti. Belanja pemerintah memediasi hubungan antara pendapatan daerah, kekayaan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan Arvin et al. (2021).

Pendapatan daerah, kekayaan daerah, sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 mempunyai efek langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah. Efek langsung dapat dilihat pada kolom 2 (regresi pada perekonomian daerah). Efek tidak langsung dapat dihitung melalui perkalian antara koefisien variabel bersangkutan pada kolom 3 (regresi pada belanja daerah) dengan koefisien belanja daerah. Efek total adalah penjumlahan dari efek langsung dan efek tidak langsung. Tabel 4 menunjukkan perhitungan efek langsung, tidak langsung, dan total. Efek total ini dapat pula dilihat pada Tabel 3 kolom 4 (regresi pada perekonomian daerah). Terdapat sedikit perbedaan nilai efek

total antara Tabel 3 kolom 4 dengan Tabel 4 kolom 6. Hal ini disebabkan adanya pengaruh moderasi dari akuntabilitas keuangan.

Pendapatan daerah berperan penting terhadap perekonomian daerah pada tingkat signifikansi di bawah 1%. Efek langsung dari pendapatan daerah terhadap perekonomian daerah adalah sebesar 0,0528 dan efek tidak langsung sebesar 0,0864. Total efek dari pendapatan daerah adalah 0,1392. Peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan perekonomian daerah secara langsung atau melalui peningkatan belanja daerah. Dengan demikian H5 dapat diterima. Hal ini sejalan dengan temuan Korkmaz et al. (2022).

Tabel 4. Efek Langsung, Efek Tidak Langsung, dan Efek Total

			Efek		
			Tidak Langsung	Langsung	Total
Variabel	**a**	**b**	**a x b**	**c'**	**a x b + c'**
Pendapatan daerah	0,2563	0,3373	0,0864	0,0528	0,1392
Kekayaan daerah	0,0935	0,3373	0,0315	0,0339	0,0654
Sumber daya manusia	0,0115	0,3373	0,0039	0,0373	0,0412
Pandemi Covid-19	-0,1184	0,3373	-0,0399	0,0264	-0,0135

Sumber: Data Olahan

Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah pada tingkat signifikansi di bawah 1%. Efek langsung dari kekayaan daerah sebesar 0,339, sedangkan efek tidak langsung sebesar 0,0315. Efek total dari kekayaan daerah adalah 0,0654. Kekayaan daerah berperan sebagai modal dalam pembangunan daerah. Semakin besar kekayaan daerah, berarti semakin besar sumber daya fisik yang tersedia bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian H2 dapat diterima. Hal serupa dinyatakan oleh Song et al. (2020).

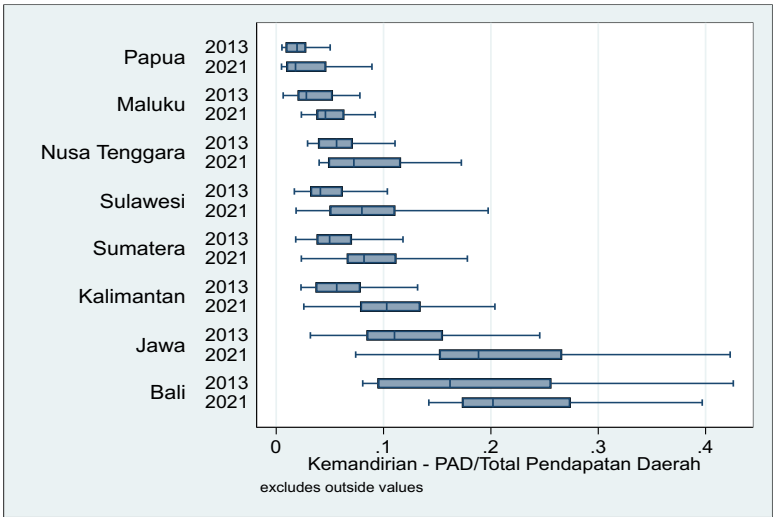
Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah pada tingkat signifikansi di bawah 1%. Efek sumber daya manusia secara langsung sebesar 0,0373 dan secara tidak langsung sebesar 0,0039. Efek total dari sumber daya manusia adalah 0,0412. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber daya manusia adalah faktor penting dan merupakan engine of growth. Dengan demikian H3 dapat diterima. Hal ini sejalan dengan temuan Sulaiman et al. (2021) dan Nawawi et al. (2022).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memperlambat perekonomian. Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis mengingat kebijakan pembatasan perjalanan di berbagai negara. Pada regresi terhadap perekonomian daerah pada Persamaan 3, pandemi Covid-19 mempunyai koefisien 0,0264 dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Artinya pandemi Covid-19 berdampak positif terhadap perekonomian. Ini tentu saja berbeda dengan yang diharapkan dan juga fakta yang terjadi. Akan tetapi, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efek langsung yang positif tersebut diimbangi dengan efek tidak langsung sebesar -0,0399 menjadi efek total sebesar -0,0135. Tanda yang berlawanan ini menunjukkan adanya *competitive mediation. Competitive mediation* mengkonfirmasikan dampak mediasi dari belanja daerah terhadap pandemi

Covid-19, tetapi juga mengindikasikan adanya efek mediasi lain yang perlu didefinisikan pada jalur antara pandemi Covid-19 dan perekonomian daerah (Zhao et al., 2010). Hal ini berarti pandemi Covid-19 membawa efek negatif terhadap perekonomian daerah secara tidak langsung. Dengan demikian H4 dapat diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan memoderasi hubungan antara belanja daerah dengan perekonomian daerah. Koefisien b_2 pada Persamaan 3 bernilai -0,1121 dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Ini berarti bahwa pada awalnya peningkatan akuntabilitas membutuhkan "biaya". Selanjutnya, efek moderasi yang dilihat pada koefisien b_3 bernilai 0,0131 dengan tingkat signifikansi di bawah 1%. Belanja daerah pada kabupaten/kota yang memiliki akuntabilitas keuangan tinggi akan memberi pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian H7 dapat diterima. Efektivitas dan efisiensi dari belanja daerah akan meningkat sejalan dengan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Dharma (2022). Peningkatan akuntabilitas keuangan merupakan kunci untuk efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan dari pemerintah daerah.

Gambar 3 menunjukkan kemandirian daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Kemandirian daerah ditunjukkan dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah ini, berarti semakin tinggi pula kapasitas daerah untuk mengumpulkan pendapatan. Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa rasio kemandirian dari kabupaten/kota di Papua dan Maluku sangat kecil, hampir seluruhnya bernilai di bawah 10%. Wilayah ini masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.



Gambar 3. Kemandirian Daerah 2013 dan 2021

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, pendapatan (asli) daerah merupakan faktor penting penentu perekonomian daerah. Bila daerah yang tertinggal hendak mengejar ketertinggalannya, maka salah satu opsi terbaik adalah dengan meningkatkan kapasitas dalam mengelola pendapatan asli daerah. Keberhasilan pengelolaan pendapatan asli daerah akan menyediakan dana yang lebih tinggi untuk belanja daerah. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini memberikan dua implikasi penting untuk peningkatan perekonomian daerah. Pertama,

pengelolaan pendapatan asli daerah yang lebih baik. Pengelolaan yang optimal akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan meningkatkan belanja daerah dan perekonomian daerah. Dengan pengelolaan yang baik, efek negatif dari pendapatan asli daerah terhadap perekonomian dapat dihindari. Kedua, perlunya peningkatan akuntabilitas keuangan di daerah. Akuntabilitas keuangan akan menjamin terlaksananya program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk pembangunan perekonomian daerah.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber daya manusia menunjang perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber daya manusia akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah secara langsung maupun tidak langsung. Belanja daerah terbukti memediasi pengaruh dari pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber daya manusia. Temuan lainnya membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Akuntabilitas keuangan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari belanja daerah untuk mendorong perekonomian daerah.

Pandemi Covid-19 juga terbukti memperlambat perekonomian daerah secara tidak langsung melalui penurunan belanja daerah dan penurunan faktor lain. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan faktor lain yang memediasi hubungan antara pandemi Covid-19 dengan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini mengimplikasikanbahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, perekonomian nasional harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah dapat dilaksanakan melalui dua aspek, peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas keuangan, agar program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi agenda untuk penelitian selanjutnya. Pendapatan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, belum memasukkan klasifikasi pendapatan lain, seperti pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Demikian juga dengan belanja daerah, klasifikasi belanja daerah menjadi lebih detil belum dilakukan, misalkan dengan membedakan antara belanja barang dan jasa dengan belanja modal. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain (misal: jumlah wisatawan, tingkat pengangguran) yang memediasi hubungan Pandemi Covid-19 dengan perekonomian daerah.

Daftar Pustaka

Ahuja, D., & Pandit, D. (2020). Public expenditure and economic growth Evidence from the developing countries. *FIIB Business Review*, 9(3), 228-236. https://doi.org/10.1177/2319714520938901

Ambarwati, A., & Payamta, P. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, investasi pemerintah dan angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 4(1), 37-51. http://doi.org/10.25273/jap.v4i1.672

Arif, M. Z., & Chishti, M. Z. (2022). Analyzing the effectiveness of fiscal decentralization in economic growth: The role of institutions. *Iranian Economic Review*, 26(2), 325-341. https://doi.org/10.22059/IER.2022.88167

Arvin, M. B., Pradhan, R. P., & Nair, M. S. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic Analysis and Policy*, 70, 468-489. https://doi.org/10.1016/J.EAP.2021.03.011

Ballinger, G. A. (2004). Using generalized estimating equations for longitudinal data analysis. *Organizational Research Methods*, 7(2), 127-150. https://doi.org/10.1177/1094428104263672

Budihardjo, A., Arianti, F., & Mas'ud, F. (2021). Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan indeks pembangunan nanusia terhadap PDRB (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 1-9. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31529

Detter, D., & Fölster, S. (2016). *The Public Wealth of Nations: How Management of Public Assets Can Boost or Bust Economic Growth*. Springer. https://doi.org/10.1057/9781137519863

Dharma, F. (2022). Financial accountability on local government and regional economic growth. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 632-639. https://doi.org/10.29210/020221472

Dibia, N. O., & Onwuchekwa, J. C. (2019). Taxation and economic growth in Nigeria. *Accounting and Taxation Review*, 3(2), 111-119. https://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/4432/1/1696076722.pdf

Du, X., Zhang, H., & Han, Y. (2022). How does new infrastructure investment affect economic growth quality? Empirical Evidence from China. *Sustainability*, 14(6), 3511. https://doi.org/10.3390/su14063511

Epo, B. N., & Nochi Faha, D. R. (2020). Natural resources, institutional quality, and economic growth: An African tale. *The European Journal of Development Research*, 32(1), 99-128. https://doi.org/10.1057/S41287-019-00222-6

Erum, N., & Hussain, S. (2019). Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries. *Resources Policy*, 63, 101429. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2019.101429

Faguet, J., & Poschl, C. (2015). *Is Decentralization Good for Development?: Perspectives from Academics and Policy Makers*. Oxford Univ; ersity Press.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics 5th ed*. McGraw-Hill.

Gurdal, T., Aydin, M., & Inal, V. (2021). The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 Countries: New evidence from

time and frequency domain approaches. *Economic Change and Restructuring*, 54(2), 305–337. https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x

Huang, F. L. (2022). Analyzing cross-sectionally clustered data using generalized estimating equations. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 47(1), 101–125. https://doi.org/10.3102/10769986211017480

Huda, N., Simon, Z. Z., & Rini, N. (2022). Analisis pengalaman wisatawan di Anyer dan Carita selama pandemi Covid 19. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(4), 542-561. https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2022.V6.I4.5429

Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 109-125. https://doi.org/10.29303/AKURASI.V6I1.343

Junejo, I., Faiz, M., Qazi, N., & Tipu, A. A. K. (2021). Impact of inflation, imports and tax revenue on economic growth of Pakistan: An empirical study from 1990-2020. *International Research Journal of Management and Social Sciences*, 2(2), 87-95. https://doi.org/10.53575/IRJMSS.V2.2(21)9.87-95

Khan, A., Khan, N., & Shafiq, M. (2021). The economic impact of COVID-19 from a global perspective. *Contemporary Economics*, 15(1), 64-75. https://doi.org/10.5709/CE.1897-9254.436

Korkmaz, S., Bayir, M., & Güvenoğlu, H. (2022). The causal relationship between tax revenues and economic growth in OECD countries. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 21(2), 599-610. https://doi.org/10.21547/jss.982678

Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. 2015. Analisis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di Indonesia (Metode kointegrasi). *Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 14-27. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1428366

Mankiw, G. (2016). *Macroeconomics, 9th Ed*. Worth Publishers.

Mursalina, M., Masbar, R., & Suriani, S. (2022). Impact of covid-19 pandemic on economic growth of the tourism sector in Indonesia. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 3(1), 18-28. https://doi.org/10.46336/IJQRM.V3I1.261

Murtala, M., & Sapitri, I. (2023). The influence of manpower and human development index on economic growth in districts of Aceh Province. *Journal of Malikussaleh Public Economics*, 6(1), 42-49. https://doi.org/10.29103/JMPE.V6I1.12141

Nawawi, C. H., Sari, A. R., Hanif, A. V., & Sholihah, F. D. (2022). The effect of human development index, ease of doing business, corruption, and distribution of ZIS funds on Indonesia's economic growth. *Indonesian Economic Review*, 2(2), 70-80. https://doi.org/10.53787/ICONEV.V2I2.11

Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The impacts of tax revenue and investment on the economic growth in Southeast Asian countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 128-146. https://doi.org/10.18196/JAI.V23I1.13270

Nyasha, S., & Odhiambo, N. M. (2019). Government size and economic growth: A review of international literature. *Sage Open*, 9(3), 1-12. https://doi.org/10.1177/2158244019877200

Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Studi empiris pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1-9. https:// ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38601

Pekár, S., & Brabec, M. (2018). Generalized estimating equations: A pragmatic and flexible approach to the marginal GLM modelling of correlated data in the behavioural sciences. *Ethology*, 124(2), 86–93. https://doi.org/10.1111/ETH.12713

Peprah, J. A., Ngalawa, H., & Derera, E. (2023). Capital flight, tax revenue and economic growth in Sub-Saharan Africa: the Role of good governance. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 17(3), 444-464. https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2023.131054

Putri, D. T., Azwardi, A., Taufiq Marwa, & Andaiyani, S. (2018). Does government spending drive regional economic growth? *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(5), 261-265. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/does-government-spending-drive-regional-economic/docview/2099337186/se-2

Ridha, M. R., & Parwanto, N. B. (2020). The effect of foreign direct investment, human development and macroeconomic condition on economic growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 46-54. https://doi.org/10.21776/UB.JIAE.2020.008.02.5

Runtunuwu, P. C. H., & Karim, Z. A. (2023). Does government expenditure affect economic growth and people's welfare?: Evidance from North Maluku. *Jurnal Mantik*, 7(2), 1125–1134. https://doi.org/ 10.35335/mantik.v7i2.3796

Sabilla, T. M., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), 54-64. https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10382

Saragih, G. V. V. R., & Hasibuan, A. N. (2020). The audit board of The Republic of Indonesia's opinion: Between regional financial performance and public welfare (The study on regencies and cities in Riau Province). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 195-211. http://www.jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/466/111

Sasongko, H. E., & Wibowo, P. (2022). Government spending and regional economic growth: The mediating effect of human development index. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 11(2), 230-257. https://doi.org/10.26418/JEBIK.V11I2.52229

Soava, G., Mehedintu, A., Sterpu, M., & Grecu, E. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on electricity consumption and economic growth in Romania. *Energies*, 14(9), 2394. https://doi.org/10.3390/EN14092394

Song, M., Ma, X., Shang, Y., & Zhao, X. (2020). Influences of land resource assets on economic growth and fluctuation in China. *Resources Policy*, 68, 101779. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2020.101779

Srivastava, S., & Talwar, S. (2020). Decrypting the dependency relationship between the triad of foreign direct investment, economic growth and human development. *The Journal of Developing Areas*, 54(2). https://doi.org/10.1353/JDA.2020.0012

Sulaiman, N. F. C., Saputra, J., & Muhamad, S. (2021). Effects of human capital and innovation on economic growth in selected ASEAN countries: Evidence from panel regression approach. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 8(7), 43-54. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no7.0043

Suprapto, H. A., Sumaryoto, & Saleh, S. (2022). The role community consumption, inflation and human development index on economic growth in West Java. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, *3*(4), 579–584. https://doi.org/10.11594/IJMABER.03.04.10

Verawaty, V., Fikri, M. I., Sari, A. P., & Merina, C. I. (2021). Analisis komparatif kinerja pemerintahan daerah se-Sumatera bagian selatan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan. *MBIA*, 20(1), 1-17. https://doi.org/10.33557/mbia.v20i1.1048

Vitenu-Sackey, P. A., & Barfi, R. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on the Global Economy: Emphasis on poverty alleviation and economic growth. *The Economics and Finance Letters*, *8*(1), 32–43. https://doi.org/10.18488/JOURNAL.29.2021.81.32.43

Wardani, D. S., & Huda, S. (2023). Analisis pengaruh PAD, IPM dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Bali. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 333-337. https://doi.org/10.56799/EKOMA.V2I2.1472

Winarto, H., Zumaeroh, & Retnowati, D. (2022). Pengaruh human capital, upah minimum dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 190–194. https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V6I1.500

Yuliadi, I. (2020). Determinants of regional economic growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 21(1), 125-136. https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5035

Zhang, J., & Danish. (2019). The dynamic linkage between information and communication technology, human development index, and economic growth: Evidence from Asian economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 26, 26982-26990. https://doi.org/10.1007/S11356-019-05926-0

Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering baron and kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197-206. https://doi.org/10.1086/651257

Zuhroh, L. H. (2018). Analisis pengaruh aset daerah dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 241-250. https://doi.org/10.22219/jie.v2i2.7027